

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Signaling Theory*

Teori sinyal menyatakan bahwa sinyal adalah suatu tindakan yang di ambil oleh manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan (Brigham dan Houston, 2011). Teori sinyal mengemukakan tentang cara perusahaan memberi sinyal kepada investor yang berupa informasi kinerja perusahaan, baik informasi keuangan maupun non keuangan (Mooduto, 2013). Teori sinyal menjelaskan bahwa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi terjadi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar karena manajer mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang dari pihak luar (Khikmawati dan Agustina, 2015).

Menurut Hendrianto (2012), teori sinyal menjelaskan bahwa pemberi dilakukan oleh manajer untuk mengurangi asimetri informasi. Manajer memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme yang menghasilkan laba yang lebih berkualitas karena prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan membantu pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang tidak overstate. Dalam praktiknya, manajemen menerapkan kebijakan akuntansi konservatif dengan menghitung depresiasi yang tinggi yang akan menghasilkan laba rendah yang relatif permanen yang berarti tidak mempunyai efek sementara pada penurunan laba yang akan berbalik pada masa yang akan datang.

Laporan keuangan seharusnya memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor untuk membuat keputusan investasi, kredit dan keputusan lainnya. Kurangnya informasi pihak investor dan kreditor mengenai perusahaan menyebabkan para investor melindungi diri dengan memberikan harga yang rendah

untuk perusahaan sesuai dengan kualitas informasi yang diberikan perusahaan kepada para investor. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan mengurangi informasi asimetri. Sebagai contoh, laba merupakan bagian dari laporan keuangan sehingga laba seharusnya juga berguna untuk keputusan kredit (Akbar, 2014).

Teori sinyal (signalling theory) digunakan untuk menjelaskan bahwa pada dasarnya laporan keuangan dimanfaatkan perusahaan untuk memberi sinyal positif maupun negatif kepada pemakainya (Sulistyanto, 2008). Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. Dalam teori ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan kualitas tinggi akan menyediakan informasi akuntansi dengan menggunakan internet (Almilia, 2009). Serta menekankan pada pentingnya informasi yang dikeluarkan perusahaan terhadap keputusan investasi pihak eksternal. Informasi merupakan salah satu unsur yang penting bagi investor dan pelaku bisnis. Jenis informasi yang dibutuhkan oleh investor dari perusahaan yaitu laporan tahunan yang lengkap, relevan, dan akurat (Ulum, 2016).

Dalam topik bahasan pelaporan keuangan melalui internet (*internet Financial Reporting*), hubungan antara teori sinyal dengan IFR terletak pada sinyal-sinyal yang dilakukan perusahaan yang dapat menarik para investor agar menanamkan modalnya pada perusahaan mereka. Perusahaan memberikan sinyal yang positif yang mereka posting laporan keuangannya di website perusahaan yang berkaitan dengan profit perusahaan mereka, kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang berjangka mereka, dan selanjutnya para investor akan mempertimbangkan apakah perusahaan tersebut layak untuk mereka berikan investasi. Selain itu perusahaan juga dapat membantu bagi para investor dalam memberikan sinyal-sinyal sesuai dengan kebutuhan mereka..

2.2 Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam mewujudkan pertanggungjawaban atas implementasi dan penyelenggaran operasional pemerintahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah maka dapat dilakukan dengan melakukan pelaporan keuangan pemerintah daerah kepada publik. Pemerintah memiliki kewajiban dalam melakukan pelaporan keuangan yang berisi mengenai hasil yang diterima dalam pelaksanaan kegiatan serta sebagai dasar bukti bahwa pemerintah telah menjalankan tugasnya sesuai dengan yang telah diberikan oleh masyarakat. Pelaporan keuangan merupakan suatu bentuk dari pengungkapan informasi keuangan. Menurut PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan tujuan dari adanya pelaporan keuangan pemerintah merupakan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik ekonomi, social, maupun politik.

Laporan keuangan pemerintah daerah ditujukan untuk dapat memenuhi tujuan umum dari pelaporan keuangan. Dimana informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat memberikan manfaat bagi pengguna untuk mengetahui kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, sumber daya yang dikelola, menilai kondisi keuangan pemerintah, serta digunakan dalam membuat keputusan dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Peraturan pemerintah No 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa dalam rangka melakukan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBN/APBD, pada setiap entitas pelapor/pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja.

Dalam laporan keuangan pokok, terdapat komponen-komponen suatu set laporan keuangan, yaitu Laporan Realisasi anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan keuangan. Menurut Diamond (2002) penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari trasparansi dan akuntabilitas.

2.2.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2009) adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sedangkan menurut Teguh Arifiyadi (2008) adalah kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya kemudian dapat menjawab hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Mahmudi (2010) adalah kewajiban agen (Pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal). Sedangkan menurut Sedarmayanti (2003) akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good corporate governance* berkaitan dengan pertanggung jawaban pimpinan atas keputusan yang hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan pertanggung jawaban mengelola organisasi. Kualitas pemerintah daerah yang baik tidak hanya ditentukan oleh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan supremasi hukum. Prinsip-prinsip akuntabilitas menurut LAN dan BPKP, Modul I (2010) yaitu sebagai berikut :

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.

2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen dalam bentuk pemutakhiran metoda dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Akuntabilitas juga dibedakan menjadi beberapa macam atau tipe sebagaimana dijelaskan oleh Wasistiono (2007) mengemukakan ada lima perspektif akuntabilitas, yaitu:

1. Akuntabilitas Administratif/Organisasi
Pertanggungjawaban antara pejabat yang berwenang dengan unit bawahannya dalam hubungan hierarki yang jelas.
2. Akuntabilitas Legal
Akuntabilitas jenis ini merujuk pada dominan publik dikaitkan dengan proses legislatif dan yudikatif. Bentuknya dapat berupa peninjauan kembali kebijakan yang telah diambil oleh pejabat publik maupun pembatalan suatu peraturan oleh institusi yudikatif. Ukuran akuntabilitas legal adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Akuntabilitas Politik
Dalam tipe ini terkait dengan adanya kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian sumber-sumber dan menjamin adanya kepatuhan melaksanakan tanggung jawab administrasi dan legal. Akuntabilitas ini memusatkan pada tekanan demokratik yang dinyatakan oleh administrasi publik.
4. Akuntabilitas Profesional
Adanya kepatuhan melaksanakan tanggungjawab administrasi dan legal. Akuntabilitas ini memusatkan pada tekanan demokratik yang dinyatakan

oleh administrasi publik di akuntabilitas Profesional. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kinerja dan tindakan berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan oleh orang profesi yang sejenis. Akuntabilitas ini lebih menekankan pada aspek kualitas kinerja dan tindakan.

5. Akuntabilitas Moral

Akuntabilitas ini berkaitan dengan tata nilai yang berlaku di kalangan masyarakat. Hal ini lebih banyak berbicara tentang baik atau buruknya suatu kinerja atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif berdasarkan ukuran tata nilai yang berlaku setempat.

2.2.2 Transparasi

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 Transparansi merupakan pemberian informasi keuangan secara terbuka kepada masyarakat atas pertimbangan masyarakat yang memiliki hak untuk mengetahui serta menyeluruh pelaksanaan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang konkret. Transparansi merupakan pemerintah secara terbuka dalam menciptakan peraturan keuangan daerah sehingga masyarakat mampu mengetahui dan diawasi oleh DPRD (Noprizal, 2017).

Transparansi adalah suatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi di dalamnya, disertai dengan ketersediaan informasi yang lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama, dan bersifat bebas, jelas dan terbuka. Istilah Transparansi dalam sekolah adalah keadaan dimana semua orang yang terkait di dalamnya terhadap kepentingan pendidikan dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah (Dharma, 2010). Transparansi merupakan kebebasan dalam melakukan aktifitas yang digunakan dalam pengambilan keputusan baik aktifitas ekonomi dan politik pemerintah (Masyhur, 2017).

Transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan yang komprehensif dan memuat peraturan penggunaan

anggaran kepada publik (Hehanussa, 2015). Transparansi pengelolaan keuangan daerah didefinisikan sebagai bentuk keterbukaan pemerintah dalam menetapkan peraturan pengelolaan keuangan daerah yang mampu memberikan informasi kepada publik dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan (Samsul dan Irwan, 2017).

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip-prinsip good governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut, publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual. Sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan direncanakan, menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban anggaran, menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait. (Mahmudi, 2010).

Kristianten (2006) mengemukakan, bahwa kriteria transparansi anggaran yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi di dalam perencanaan dan penganggaran dapat diukur melalui beberapa indikator , antara lain :

1. Ketersediaan dan aksebilitas dokumen anggaran
2. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi
3. Keterbukaan proses
4. Kejelasan dan kelengkapan informasi dalam dokumen anggaran

Transparansi memiliki tiga karakteristik, Mardiasmo (2017) mengemukakan karakteristik tersebut yaitu Informatif (*Informative*), Keterbukaan (*Openness*), Pengungkapan (*Disclosure*). Berikut adalah penjelasan dari karakteristik transparansi:

1. Informatif

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

2. Keterbukaan

Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.

3. Pengungkapan

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholders) atas aktivitas dan kinerja finansial.

2.3 *Internet Financial Reporting (IFR)*

2.3.1 Pengertian *Internet Financial Reporting (IFR)*

Pengungkapan informasi keuangan yang dilakukan dengan memanfaatkan media internet merupakan salah satu metode alternatif dalam pelaporan keuangan untuk menunjukkan komitmen pemerintah daerah yang akuntabel dan transparansi serta dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Dimana hal ini dilakukan pemerintah dalam rangka untuk memenuhi dan memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap informasi-informasi mengenai kinerja penyelenggaran pemerintahan dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bahwa pemerintah telah menjalankan tugasnya dengan baik (Livana, 2020). IFR merupakan pengungkapan dan pelaporan keuangan sektor publik dengan menggunakan situs web pemerintah (*e-government*). IFR dalam sektor swasta dan sektor publik memiliki tujuan yang sama dengan menggunakan media internet untuk mengungkapkan dan menyebarluaskan laporan keuangan yang diberikan kepada para pemangku kepentingan publik. Informasi keuangan yang diberikan melalui internet mencakup laporan keuangan yang lengkap (Azis, 2020).

Menurut *Government Financial Officers Association* (2009) dalam (Alhajjriana, Nor, dan Wijaya, 2017) dalam pemanfaatan internet yang digunakan sebagai sarana pelaporan informasi keuangan dapat memberikan manfaat, seperti meningkatkan kepedulian terhadap laporan keuangan dan anggaran oleh pemerintah, mempermudah pengguna dalam mengakses informasi keuangan, dapat meminimalisir biaya dan waktu yang akan keluar, meningkatkan komunikasi dan interaksi terhadap masyarakat. Praktik *Internet Financial Reporting* (IFR) sebagai salah satu wujud internet pemerintah terus dipacu untuk menjadikan era pemerintahan yang lebih berkualitas dan terpercaya maka kemungkinan diperlukan adanya dan efisiensi manajemen dan sistem pemerintahan internet. *Internet Financial Reporting* atau pelaporan keuangan di internet merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas anggaran yang telah dikelolanya melalui internet (Verawati, 2017).

Dalam upaya untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, efektif, akuntabel, transparan, serta memberikan pelayanan kepada publik yang berkualitas dan dapat meningkatkan kepercayaan publik, maka pemerintah perlu melakukan keterbukaan informasi keuangan melalui website resmi yang dapat dengan mudah untuk diakses dan dijangkau oleh banyak orang. Selain itu menurut *Government Financial Officer's Association* (GFOA) penggunaan *Internet Financial Reporting* (IFR) dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Meningkatkan perhatian pemerintah terhadap dokumen-dokumen laporan keuangan dan anggaran. Pemerintah akan menjadi lebih teliti dan hati-hati dalam menyusun laporan keuangan dan anggaran karena akses yang terbuka memungkinkan semua pihak dapat mengaksesnya.
2. Dapat memberikan kemudahan dalam melakukan analisis. Informasi laporan keuangan dan anggaran dapat diakses dimana saja dan kapan saja.
3. Menghemat biaya publikasi karena internet dapat luas menjangkau.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat memonitor kinerja keuangan pemerintah dengan mudah melalui laporan keuangan yang tersedia di internet.

2.3.2 Faktor Yang Mempengaruhi *Internet Financial Reporting* (IFR)

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi *Internet Financial Reporting* (IFR) adalah sebagai berikut ini:

1. Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah

Tingkat ketergantungan pemerintah daerah dikarenakan dalam pelaksanaan pemerintahan, dengan tingginya tingkat ketergantungan pada dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat (dana alokasi umum) maka akan adanya pengawasan terhadap pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Sehingga, mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan mengenai informasi keuangan dalam situs resmi pemerintah daerah (Livana, 2020).

Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat merefleksikan sejauh mana pemerintah daerah mengandalkan pemerintah pusat dalam urusan pembiayaan pengeluaran daerahnya. Ketergantungan ini ditunjukkan dari besarnya pendapatan daerah yaitu pada dana perimbangan yang ditransfer kepada pemerintah daerah yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana transfer umum dan dana transfer khusus. Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 38, Dana Transfer Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana transfer khusus terdiri atas dana alokasi khusus baik fisik maupun nonfisik.

Dana transfer umum terdiri atas dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU). Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Tingkat ketergantungan daerah pada pemerintah pusat dapat diukur dengan besarnya pendapatan transfer atau dana perimbangan yang diterima (Noviyanti dan Kiswanto, 2016). Dengan diberikannya dana perimbangan (dana transfer) sesuai dengan kebutuhan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diharapkan dapat memberi kinerja yang lebih baik.

2. Opini Audit

Opini audit merupakan salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan dilihat atas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Semakin baik opini yang diperoleh oleh pemerintah daerah menunjukkan pengungkapan yang dilakukan juga memadai (Naopal, dkk., 2017), selain itu menunjukkan pengelolaan keuangan dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang semakin baik pula. Hal ini akan mendorong pengungkapan IFR yang semakin tinggi (Ratmono, 2013). Hal tersebut merupakan salah satu wujud untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Halim (2015) menyatakan bahwa opini audit merupakan kesimpulan kewajaran atas informasi yang telah diaudit. Dikatakan wajar apabila bebas dari keraguakeraguan dan ketidakjujuran (free from bias and dishonesty), dan lengkap informasinya (*full disclosure*). Opini audit yaitu opini atau pendapat yang diberikan oleh auditor tentang kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan tempat auditor melaksanakan audit (Mulyadi, 2014).

Pengertian opini audit (audit opinion) menurut Lubis dan Dewi (2020) merupakan pendapat auditor mengenai penyajian laporan keuangan. Opini

auditor yang melakukan pemeriksaan atas penyajian laporan keuangan perusahaan merujuk pada ketentuan atau standar dasar akuntansi keuangan yang berlaku. Tanggung jawab utama auditor adalah menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa opini audit merupakan pendapat dari hasil analisis bukti audit atas kewajaran informasi laporan keuangan yang telah diauditya. Apabila auditor ragu-ragu untuk mencapai suatu asersi yang material maka ia harus menangguhkan pemberian pendapatnya sampai mendapatkan bukti yang kompeten. Pendapat yang diberikan kepada asersi manajemen dari klienatauperusahaan yang di audit diklasifikasi sebagai pengecualian tanpa pengecualian, wajar, tidak menguntungkan, dan tidak masuk akal.

3. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan sejumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil proses-proses demografi yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Proses kelahiran dan kematian tidak terjadi secara serentak di setiap daerah, begitu juga dengan perpindahan. Proses demografi tersebutlah yang mengakibatkan jumlah penduduk di tiap daerah berbeda-beda atau tidak sama (Rusli, 2011). Jumlah penduduk menunjukkan seberapa banyak penduduk yang menetap disuatu wilayah. Salah satu peran penduduk yang sangat diharapkan pemerintah dalam memberikan kontribusi pembangunan negara adalah membayar pajak (Manik, 2012).

Jumlah Penduduk yaitu merupakan suatu banyak individu manusia yang dapat menepati suatu wilayah atau negara dalam kurun waktu tertentu. serta dapat menentukan jumlah penduduk didalam pada suatu wilayah dan serta dapat dilakukan dengan cara mengukur pada data demografi yang dengan secara tepat tau akurat untuk dapat menjaringnya. kemudian pada menjaring data demografi, tersebut dilakukan dengan adanya tiga cara yang diantaranya

ialah sensus penduduk, registrasi penduduk dan juga survei. Menurut Lembaga BPS dalam Statistik Indonesia (2013).

4. Ukuran Pemerintah Daerah

Susiyah dkk. (2018) mengatakan bahwa ukuran pemerintah dapat dilihat dari besar atau kecilnya total aset yang dimiliki pemerintah. Semakin besar suatu ukuran pemerintahan maka akan timbul rasa keingintahuan dari masyarakat terhadap aset pemerintah. Kemungkinan masyarakat beranggapan negative yang timbul terhadap kinerja pemerintah dapat diatasi dengan adanya transparansi atas laporan keuangan pemda. Sehingga untuk mengurangi anggapan tersebut pemerintah dapat melukai publikasi laporan keuangan dengan memanfaatkan e- goverment karena merupakan media yang murah dan cepat. Pelaporan tersebut menggambarkan sifat transparansi dari pemerintah kepada masyarakat.

Menurut Maiyora (2015) Ukuran dari pemerintah mengarah pada seberapa besar organisasi. Pemerintah daerah dengan ukuran yang besar sangat diinginkan dapat mampu memberikan layanan yang baik kepada banyak pihak keinginan serta keharusan terhadap pemerintah daerah akan memicu dari kinerjadari arah pemerintah daerah yang lebih baik. Pemerintah daerah yang memiliki ukuran dari aset yang besar akan memiliki yang besar pula untuk melakukan penyampaian informasi dari keuangan pemerintah di daerah. Informasi yang terdapat ada sebuah dalam laporan pertanggung jawaban atau pelaporan dari keuangan pemerintahdaerahdapat dipakai sebagai salah satu pembantu untuk mencari dari besarnya kinerja keuangan pemerintah daerah (Abdullah, 2013).

5. Kekayaan Pemerintah daerah

Kekayaan pemerintah daerah dapat diukur dengan pendapatan asli daerah. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 nomor 18, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut

berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Tujuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 3 adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pemerintah daerah dengan kekayaan yang besar mampu melakukan pelayanan publik yang optimal. Tingkat kekayaan daerah merefleksikan kemampuan daerah dalam memaksimalkan setiap potensi menjadi sumber pembiayaan daerah.

Masdiantini dan Erawati (2016) dimana tingkat kekayaan pemerintah daerah dapat diukur dengan indikatornya yaitu nilai laju pertumbuhan pendapatan asli daerah yang akan menunjukkan seberapa besar pemerintah daerah dalam mempertahankan serta meningkatkan pendapatan asli daerahnya di setiap periode sehingga pemerintah dapat dikatakan makmur. Peningkatan PAD diharapkan menjadi stimulus peningkatan pertumbuhan ekonomi dan juga semakin memperkuat kemandirian pemerintah daerah (Noviyanti dan Kiswanto, 2016).

6. PDRB Perkapita

Menurut Sukirno (2000), pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output per kapita dalam jangka yang panjang, penekanannya ialah pada tiga aspek yakni proses, output per kapita, serta jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses, bukan hanya gambaran ekonomi sesaat. Pembangunan daerah serta pembangunan sektoral harus dilaksanakan sejalan agar pembangunan sektoral yang berada di daerah-daerah dapat berjalan sesuai dengan potensi serta prioritas daerah. Produk Domestik Regional Bruto yaitu sejumlah nilai tambah yang dihasilkan dalam kegiatan ekonomi di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menjelaskan sejumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dapat dihitung dengan menggunakan harga pada

tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan hasil dari keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang kemudian dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar (bps.go.id).

Menurut Hudoyo dan Mahmud (2014) level perekonomian masyarakat disuatu daerah dapat mempengaruhi pendapatan perkapita masyarakat dan tingkat perekonomian juga mempengaruhi teknologi yang di dapatkan oleh masyarakat. Gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah atau wilayah tertentu bisa dilihat melalui pendapatan per kapita. Tingkat produktivitas masyarakat dapat menjadi gambaran sebagai ukuran pendapatan per kapita. Semakin tinggi dan besar dari pendapatan masyarakat di suatu daerah maka akan semakin tinggi kemampuan untuk dapat mengadopsi teknologi dalam usaha mendapatkan informasi.

2.4 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan uraian teori, ada beberapa penelitian yang menelitian tentang *internet financial reporting* adalah:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

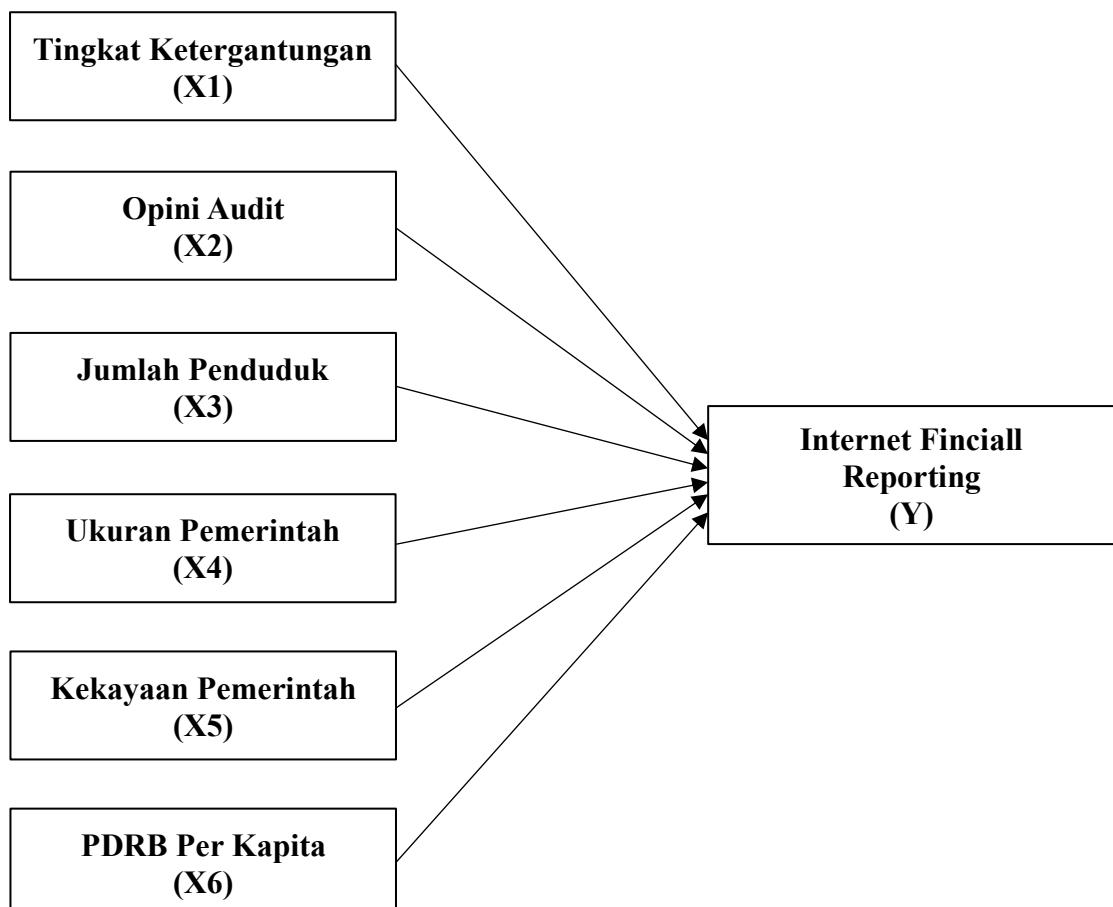
Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Melisa Livana (2020)	Determinan <i>Internet Financial Reporting</i> (IFR) Dalam Website Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2017-2018)	Tingkat Ketergantungan Pemda (X1), Opini Audit (X2), Jumlah Penduduk (X3), Ukuran Pemerintah Daerah (X4), Kekayaan Pemerintah Daerah (X5).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap <i>Internet Financial Reporting</i> (IFR) dalam website pemerintah daerah. Sementara, tingkat ketergantungan, jumlah penduduk, ukuran pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap <i>Internet Financial Reporting</i> (IFR) dalam website pemerintah daerah.

Darmesta Hadianto (2020)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan <i>Internet Financial Reporting</i> (IFR) di Indonesia	Kompetisi Politik (X1), Ukuran Pemda (X2), Rasio Pembiayaan Utang (X3), Pendapatan Perkapita (X4), Kekayaan Daerah (X5), Opini Audit (X6)	Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio persaingan politik dan kekayaan daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan IFR. Sedangkan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan IFR. Selanjutnya, debt financing berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan IFR. Terakhir, pendapatan per kapita dan opini audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan IFR.
Evin Amaliyah Masra (2020)	Faktor Yang Mempengaruhi <i>Internet Financial Reporting</i> (IFR) Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Sumatera Barat	Ukuran Pemerintah (X1), Pendapatan Perkapita (X2), Belanja Daerah (X3)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB perkapita dan Belanja daerah berpengaruh terhadap <i>Internet Financial Reporting</i> (IFR) pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat. Sedangkan Ukuran pemerintah tidak memiliki berpengaruh terhadap <i>Internet Financial Reporting</i> (IFR) pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat.
Praditya Putra Perdana (2018)	Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah, Kompetisi Politik, Opini Audit Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Aksesibilitas <i>Internet Financial</i>	Kekayaan Pemerintah Daerah (X1), Kompetisi Politik (X2), Opini Audit (X3), Indeks Pembangunan Manusia (X4)	Hasil pengujian dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa kekayaan pemerintah daerah, kompetisi politik, opini audit, dan indeks pembangunan manusia memiliki berpengaruh signifikan terhadap aksesibilitas IFR pada

	<i>Reporting (IFR) Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia</i>		pemerintah daerah di Indonesia.
Arthaingan H. Mutiha (2017)	Faktor Penentu Aksesibilitas <i>Internet Financial Reporting</i> Pada <i>E-Government</i> Pemerintah Kota/Kabupaten Di Jawa Barat	Ukuran Pemda (X1), Pendapatan Per Kapita Penduduk (X2), Belanja daerah (X3), Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X4).	Hasil penelitian ini adalah tidak terdapat hubungan positif antara ukuran pemda, Pendapatan per kapita penduduk, Belanja daerah dan Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan aksesibilitas laporan keuangan.

2.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dari beberapa penelitian diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.6 Hipotesis

2.6.1 Pengaruh Tingkat Ketergantungan Terhadap *Internet Financial Reporting*

Sebagian besar pendapatan yang dimiliki pemerintah daerah berasal dari dana alokasi yang diberikan oleh pemerintah pusat. Puspita dan Martani (2012) menjelaskan bahwa dana perimbangan pada suatu pemda merepresentasikan tingkat ketergantungan pemerintah daerah. Dimana adanya kecenderungan pemerintah daerah meningkatkan praktik *Internet Financial Reporting* (IFR) apabila adanya tingkat ketergantungan yang tinggi pula oleh pemerintah daerah. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat memiliki implikasi terhadap kinerja administrasi pemerintah daerah dikarenakan apabila dana alokasi yang diterima oleh pemerintah daerah meningkat maka pemerintah pusat akan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan pada teori keagenan, menunjukkan adanya hubungan yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimana pemerintah daerah selaku agent selain memiliki tanggungjawab terhadap masyarakat juga perlu adanya pertanggungjawaban pada pihak pusat hal ini dikarena pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemda dalam mengelola keuangan daerah untuk menyeimbangkan keuangan melalui dana perimbangan (Nurhidayati dan Wahasusmiah, 2018). Tingkat ketergantungan telah dilakukan penelitian oleh Puspita dan Martani (2012) yang dimana hasil dalam penelitiannya bahwa tingkat ketergantungan memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan pada website Pemda. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Livana (2020) dan Nurhidayati dan Wahasusmiah (2018) yang menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet. Berdasarkan uraian teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis peelitian:

H_1 : tingkat ketergantungan berpengaruh signifikan terhadap *Internet Financial Reporting*.

2.6.2 Pengaruh Opini Audit Terhadap *Internet Financial Reporting*

Opini audit merupakan suatu pernyataan yang berikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK RI) mengenai tingkat kewajaran atas hasil kinerja pemerintah yang disajikan dalam laporan keuangan. Dimana pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melaporkan laporan keuangan kepada BPK RI agar dilakukannya audit/pemeriksaan serta dengan adanya opini yang diberikan oleh BPK RI untuk dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Nosihana dan Yaya, 2016). Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK RI dalam memberikan opini terbagi menjadi 4 (empat) jenis.

Berdasarkan pada teori keagenan, BPK RI selaku auditor belum berperan penting dalam mengurangi adanya *agency problem* dikarenakan dengan adanya opini yang diberikan akan mendorong pemda dalam memberikan informasi terbuka pada publik sehingga tidak adanya ketidakseimbangan informasi keuangan ((Rahim dan Martani, 2016). Opini audit merupakan suatu pernyataan yang berikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK RI) mengenai tingkat kewajaran atas hasil kinerja pemerintah yang disajikan dalam laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Rahim dan Martani (2016) dan Sofyani dan Dwirama (2019) menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan pada website pemda. Penelitian yang dilakukan oleh Livana (2020) hasil penelitian yang menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR) dalam website pemerintah daerah. Berdasarkan uraian teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian:

H₂ : opini audit berpengaruh signifikan terhadap *Internet Financial Reporting*.

2.6.3 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap *Internet Financial Reporting*

Jumlah penduduk merupakan proksi dari kompleksitas pemerintah. Kompleksitas tidak menghambat tingkat pengungkapan namun bahkan dapat meningkatkan tingkat pengungkapan (Nurhidayati dan Wahasusmiah, 2018). Livana (2020) jumlah penduduk yang besar akan mencerminkan kebutuhan yang besar pula akan

layanan yang diberikan publik pada setiap daerah. Semakin banyak jumlah penduduk maka tekanan untuk meminta informasi dan pertanggungjawaban pemerintah daerah untuk pengungkapan LKPD terhadap masyarakat juga semakin besar, mengingat fungsi pemerintah adalah sebagai pelayan masyarakat. Penduduk merupakan sejumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil proses-proses demografi yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan (Rusli, 2011).

Berdasarkan pada teori keagenan dengan jumlah penduduk yang besar akan menunjukkan bahwa adanya asimetri informasi yang besar pula antara principal dan agent, serta akan lebih besar biaya-biaya yang akan dikeluarkan agent dalam menyampaikan laporan keuangan kepada principal (*bonding cost*). Namun demikian, dari hasil pengujian menunjukkan bahwa dengan besarnya jumlah penduduk tidak terbukti dapat mendorong pemda dalam melakukan publikasi informasi keuangan dalam website. Hal ini dapat dikarenakan dengan banyaknya jumlah penduduk namun apabila tidak memiliki daya pikir yang baik dan kritis terhadap kinerja pemerintah maka permintaan atas transparansi terhadap laporan keuangan akan rendah (Nurhidayati dan Wahasusmiah, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Verawaty (2018) bahwa adanya hubungan positif antara jumlah penduduk terhadap pengungkapan informasi keuangan dalam website pemda. Namun penelitian yang dilakukan Livana (2020) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*. Berdasarkan uraian teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian:

H_3 : jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap *Internet Financial Reporting*.

2.6.4 Pengaruh Ukuran Pemerintah Terhadap *Internet Financial Reporting*

Ukuran pemerintah daerah didasari pada besarnya aset yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah tersebut. Pemerintah daerah yang memiliki ukuran yang besar cenderung memiliki kekayaan yang besar pula (Trisanwati dan Achmad, 2015). Susiyah dkk. (2018) mengatakan bahwa ukuran pemerintah dapat dilihat dari besar

atau kecilnya total aset yang dimiliki pemerintah. Sehingga untuk mengurangi anggapan tersebut pemerintah dapat melukan publikasi laporan keuangan dengan memanfaatkan *e-government* karena merupakan media yang murah dan cepat. Pelaporan tersebut menggambarkan sifat transparansi dari pemerintah kepada masyarakat.

Berdasarkan teori agensi, dengan ukuran pemerintahan yang besar maka diperlukanya pengawasan mengenai penyelenggaraan pemerintahan oleh masyarakat. Sehingga perlunya menyajikan laporan keuangan melalui internet dengan biaya-biaya yang akan dikeluarkan agent (bonding cost). Namun demikian, dari hasil pengujian menunjukan bahwa besaran dari total aset tidak terbukti mendorong pemda dalam melakukan publikasi informasi keuangan dalam website. Hal ini bisa saja terjadi dapat dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang dimana dapat terjadi penyelewengan dana yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah serta dengan total aset yang besar cenderung memiliki pengelolaan keuangan yang kompleks sehingga kualitas pengelolaan aset yang kurang baik dan memperoleh catatan dari badan pemeriksaan keuangan (BPK) (Hilmi dan Martani, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Nosihana dan Yaya (2016) yang hasilnya mengatakan bahwa ukuran pemerintah daerah (size) berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di *e-government*. Tetapi penelitian yang dilakukan oleh Livini (2020) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap *Internet Financial Reporting*. Berdasarkan uraian teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian:

H₄ : ukuran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap *Internet Financial Reporting*.

2.6.5 Pengaruh Kekayaan Pemerintah Terhadap *Internet Financial Reporting*

Kekayaan pemerintah daerah, keberhasilan pemerintah daerah dalam kinerjanya dapat dilihat dari tingkat kekayaan daerah. Nosihana dan Yaya (2016) mengatakan jumlah pendapatan asli daerah (PAD) dapat mencerminkan kekayaan daerah.

Sehingga pengelolaan potensi sumber daya yang dimiliki dapat dijadikan indikator kesuksesan pemerintah. Kekayaan pemerintah daerah merupakan sejumlah asset yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah yang saat ini sedang menjabat. Kekayaan pemerintah daerah berhubungan positif dengan meningkatnya pengungkapan karena dapat memberikan sinyal dari kualitas kepala daerah (Wau, 2015).

Berdasarkan teori agensi dengan kekayaan daerah yang besar akan mendorong pemerintah untuk melakukan pengungkapan atau menunjukannya terhadap publik sebagai suatu bentuk signal yang baik bahwa pemerintah daerah tersebut memiliki manajemen publik yang baik. Dengan melakukan pengungkapan dapat dilakukan dengan media yang mudah untuk diakses publik seperti media internet melalui website pemda. Hal ini diduga dengan jumlah pendapatan yang tinggi tidak secara otomatis akan memberikan pengaruh terhadap ketersediaan informasi keuangan. Jadi apabila suatu pemerintah daerah memiliki pendapatan yang besar tidak secara langsung memberikan dampak bahwa masyarakat juga membutuhkan informasi keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah melalui website (Nosihana dan Yaya, 2016). Dalam penelitian Rahman dkk (2013) mengatakan bahwa kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap *Internet Financial Reporting* pemda di e-government. Tetapi penelitian yang dilakukan oleh Livini (2020) yang menyatakan bahwa kekayaan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap *Internet Financial Reporting*. Berdasarkan uraian teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian:

H_5 : kekayaan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap *Internet Financial Reporting*.

2.6.6 Pengaruh PDRB Per Kapita Terhadap *Internet Financial Reporting*

Masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi pada suatu daerah akan meningkatkan kapasitas dari kebutuhan akan akuntabilitas pemerintah (Ingram, 1984). Menurut Wau dan Ratmono (2015) daerah yang masyarakatnya memiliki pendapatan tinggi akan mempunyai tingkat pengawasan politik yang tinggi oleh masyarakat dan

otomatis akan meningkatkan permintaan mengenai informasi kinerja dari pemerintah. Hudoyo dan Mahmud (2014) mengatakan bahwa pengungkapan informasi keuangan oleh pemda dipengaruhi oleh level ekonomi masyarakat daerah tersebut. Semakin besar pendapatan semakin besar pula permintaan. Pendapatan perkapita yang semakin tinggi akan menjadikan masyarakat melakukan monitoring politik yang akhirnya semakin tinggi pula sehingga keharusan yang diberikan untuk menyediakan informasi keada public juga akan menjadi semakin besar (Styles, 2007). Maka alasan tersebut memuat pelaporan dari keuangan dalam website.

Hudoyo dan Mahmud (2014) mengatakan bahwa pengungkapan informasi keuangan oleh pemda dipengaruhi oleh level ekonomi masyarakat daerah tersebut. Semakin besar pendapatan semakin besar pula permintaan. Pendapatan perkapita yang semakin tinggi akan menjadikan masyarakat melakukan monitoring politik yang akhirnya semakin tinggi pula sehingga keharusan yang diberikan untuk menyediakan informasi keada public juga akan menjadi semakin besar (Styles, 2007). Maka alasan tersebut memuat pelaporan dari keuangan dalam website. Penelitian yang dilakukan oleh Masra (2020) yang menyatakan bahwa PDRB perkapita berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR) pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hadianto (2020) menyatakan bahwa pendapatan per kapita tidak berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR). Berdasarkan uraian teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian:

H_6 : PDRB per kapita berpengaruh signifikan terhadap *Internet Financial Reporting*.